

Boris Johnson's Policy Analysis on Maritime Security in the North Atlantic

Triyani^{1*}, Asep Iwa Soemantri², Lukman Yudho Prakoso³, Panji Suwarno⁴, Meli Ruslinar⁵, Muhamad Faisal⁶, Raesha Syahnaz Zahra⁷, Yosyea Oktaviandra⁸, Yussie Novitasari⁹

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

Corresponding Author : Triyani triyani.acc@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords Boris Johnson, Maritime Security, North Atlantic, NATO, Brexit

Received : 20 July

Revised : 04 Augustus

Accepted: 10 September

©2024 Triyani, Prakoso, Suwarno, Soemantri, Ruslinar, Faisal, Zahra, Oktaviandra, Novitasari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study analyses Boris Johnson's policies on maritime security in the North Atlantic, with a focus on naval modernisation and collaboration with NATO. The study finds that Johnson's policies focus on improving maritime defence technology and strengthening multilateral cooperation in the face of the Russian submarine threat. Although Brexit has changed the UK's relationship with the European Union, the UK has maintained its role in maintaining maritime stability through NATO. The results of this study demonstrate the effectiveness of Johnson's policies in addressing security challenges in the North Atlantic, although there is a need for continued investment in maritime defence technology. Recommendations for further research include longitudinal studies and research on the role of technology.

Analisis Kebijakan Boris Johnson terhadap Keamanan Maritim di Atlantik Utara

Triyani^{1*}, Asep Iwa Soemantri², Lukman Yudho Prakoso³, Panji Suwarno⁴, Meli Ruslinar⁵, Muhamad Faisal⁶, Raesha Syahnaz Zahra⁷, Yosyea Oktaviandra⁸, Yussie Novitasari⁹

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

Corresponding Author : Triyani triyani.acc@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Boris Johnson, Keamanan Maritim, Atlantik Utara, NATO, Brexit

Received : 20 Juli

Revised : 04 Agustus

Accepted: 10 September

©2024 Triyani, Prakoso, Suwarno, Soemantri, Ruslinar, Faisal, Zahra, Oktaviandra, Novitasari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan Boris Johnson terkait keamanan maritim di Atlantik Utara, dengan fokus pada modernisasi angkatan laut dan kolaborasi dengan NATO. Studi ini menemukan bahwa kebijakan Johnson berfokus pada peningkatan teknologi pertahanan maritim dan penguatan kerja sama multilateral dalam menghadapi ancaman kapal selam Rusia. Meskipun Brexit mengubah hubungan Inggris dengan Uni Eropa, Inggris tetap mempertahankan perannya dalam menjaga stabilitas maritim melalui NATO. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan Johnson dalam menangani tantangan keamanan di Atlantik Utara, meskipun terdapat kebutuhan untuk peningkatan investasi berkelanjutan dalam teknologi pertahanan maritim. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut meliputi studi longitudinal dan penelitian tentang peran teknologi.

PENDAHULUAN

Atlantik Utara adalah salah satu kawasan strategis dunia, terutama bagi keamanan maritim dan kepentingan ekonomi global. Wilayah ini merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa, serta tempat di mana operasi militer penting dari NATO terjadi (Till, 2009). Ancaman dari kapal selam, perompakan, dan aktivitas ilegal di laut telah menjadi isu kritis yang dihadapi negara-negara di sekitar perairan Atlantik Utara. Oleh karena itu, keamanan maritim di kawasan ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan politik global. Inggris, sebagai negara maritim utama, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim di wilayah ini, terutama melalui keanggotaannya di NATO.

Boris Johnson, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 2019 hingga 2022, menghadapi berbagai tantangan keamanan internasional, termasuk di Atlantik Utara. Selama masa jabatannya, Johnson berfokus pada peningkatan kapasitas militer Inggris, termasuk modernisasi angkatan laut untuk menangani ancaman di perairan internasional (House of Commons, 2020). Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam kekuatan maritim, kebijakan Johnson mencerminkan komitmen Inggris untuk tetap menjadi kekuatan maritim global yang mampu melindungi kepentingan nasional dan sekutu di kawasan Atlantik Utara.

Atlantik Utara telah menghadapi berbagai ancaman keamanan, terutama dari aktivitas kapal selam Rusia yang meningkat di kawasan tersebut. Laporan oleh Connolly (2020) menunjukkan bahwa aktivitas kapal selam Rusia telah menimbulkan kekhawatiran besar di antara negara-negara NATO, termasuk Inggris. Boris Johnson mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat keamanan maritim, termasuk peningkatan patroli angkatan laut dan kerja sama erat dengan sekutu NATO untuk memantau dan menangkal ancaman dari Rusia. Langkah-langkah ini mencerminkan pentingnya keamanan maritim bagi stabilitas kawasan Atlantik Utara dan kepentingan geopolitik Inggris.

Pasca-Brexit, Inggris harus menegaskan kembali perannya dalam aliansi pertahanan internasional, terutama di NATO. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa, Boris Johnson tetap berkomitmen untuk memperkuat hubungan keamanan dengan negara-negara NATO, khususnya di Atlantik Utara (Rynning, 2019). Dalam hal ini, kebijakan Johnson mencerminkan upaya Inggris untuk mempertahankan perannya sebagai pemimpin dalam keamanan maritim internasional, meskipun menghadapi tantangan geopolitik baru akibat Brexit. Komitmen terhadap NATO di Atlantik Utara memperlihatkan bagaimana Inggris terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Boris Johnson terkait keamanan maritim di Atlantik Utara, dengan fokus pada modernisasi angkatan laut dan kolaborasi dengan NATO. Mengingat pentingnya Atlantik Utara sebagai jalur perdagangan dan zona strategis militer, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kebijakan maritim Inggris di bawah Johnson berdampak pada stabilitas regional dan global. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi Inggris dalam

mempertahankan peran keamanan maritimnya di tengah dinamika politik pasca-Brexit (Whitman, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan Maritim: Konsep dan Pentingnya dalam Konteks Global

Keamanan maritim adalah konsep yang mencakup upaya untuk melindungi perairan dan jalur laut dari berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Menurut International Maritime Organization (IMO), keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap perdagangan laut, pencegahan perompakan, penanganan terorisme maritim, dan pelestarian lingkungan laut (IMO, 2020). Perairan Atlantik Utara, sebagai salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia, memiliki signifikansi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan geopolitik global. Menurut Till (2009), kekuatan maritim (sea power) memainkan peran penting dalam menentukan kekuasaan suatu negara di laut, dan keamanan perairan ini merupakan elemen krusial dalam diplomasi serta pertahanan internasional.

Peran Inggris dalam Keamanan Maritim Atlantik Utara

Sejarah maritim Inggris menunjukkan keterlibatan kuat negara tersebut dalam menjaga stabilitas di wilayah Atlantik Utara. Mahan (1890) dalam *The Influence of Sea Power Upon History* menekankan bahwa kekuatan angkatan laut adalah salah satu kunci dominasi global, dan Inggris memanfaatkan keunggulannya ini untuk menjaga jalur perdagangan yang aman dan mencegah ancaman dari luar. Selama era modern, Inggris telah menjadi aktor utama dalam operasi keamanan maritim di Atlantik Utara melalui keterlibatan dalam NATO dan operasi gabungan dengan Amerika Serikat serta negara-negara Eropa lainnya (Simpson, 2017). Boris Johnson, selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, melanjutkan komitmen ini dengan berbagai kebijakan pertahanan, termasuk modernisasi angkatan laut dan keterlibatan lebih aktif di NATO.

Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Maritim Boris Johnson

Boris Johnson, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 2019 hingga 2022, mengarahkan sejumlah kebijakan yang memprioritaskan modernisasi angkatan laut dan penguatan peran Inggris dalam menjaga keamanan maritim global, termasuk di Atlantik Utara. Menurut laporan resmi pemerintah Inggris (2021), Johnson berfokus pada peningkatan kekuatan maritim melalui pembangunan kapal-kapal induk baru, kapal selam nuklir, dan sistem pertahanan maritim yang lebih canggih. Studi oleh Childs (2020) menegaskan bahwa kebijakan Johnson terkait pertahanan maritim dirancang untuk menghadapi ancaman dari Rusia yang semakin agresif, terutama dalam aktivitas kapal selam di Atlantik Utara, yang menjadi perhatian utama bagi keamanan Eropa dan NATO.

NATO dan Peran Inggris dalam Keamanan Atlantik Utara

NATO, sebagai organisasi pertahanan kolektif, memainkan peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah Atlantik Utara. Inggris, sebagai salah satu

pendiri NATO, telah menjadi pemain utama dalam operasi keamanan maritim yang dilakukan oleh aliansi tersebut. Menurut Rynning (2019), keterlibatan Inggris dalam NATO semakin penting di era pasca-Brexit, karena Inggris mencari cara untuk memperkuat hubungannya dengan sekutu transatlantik di luar Uni Eropa. Selama pemerintahan Boris Johnson, Inggris terus berkontribusi secara signifikan dalam operasi NATO di Atlantik Utara, termasuk melalui latihan militer bersama dan operasi pengawasan kapal selam (NATO, 2020). Hal ini menunjukkan komitmen Inggris untuk mempertahankan peran strategisnya di kawasan tersebut.

Dampak Brexit terhadap Keamanan Maritim Inggris

Brexit memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan maritim Inggris, termasuk hubungannya dengan Uni Eropa dan sekutu NATO. Sebelum Brexit, Inggris menjadi bagian integral dari kerangka kerja pertahanan bersama Uni Eropa, namun setelah keluarnya dari Uni Eropa, Inggris harus menyesuaikan kembali posisinya dalam hubungan pertahanan internasional (Whitman, 2019). Johnson mengarahkan Inggris untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara NATO dan AS, dan tetap mempertahankan peran aktif dalam keamanan maritim Atlantik Utara. Menurut laporan House of Commons (2020), kebijakan maritim Inggris di era pasca-Brexit tetap fokus pada keamanan kawasan Atlantik, dengan peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan untuk memperkuat kemampuan maritim.

Ancaman Keamanan di Atlantik Utara

Ancaman keamanan maritim di Atlantik Utara semakin kompleks, termasuk ancaman dari kapal selam Rusia, perompakan, dan aktivitas ilegal di laut. Menurut Connolly (2020), aktivitas kapal selam Rusia di Atlantik Utara telah menjadi ancaman utama bagi keamanan maritim, terutama bagi negara-negara NATO. Boris Johnson, dalam kebijakan pertahanannya, menekankan perlunya pengawasan dan respons terhadap ancaman-ancaman ini, terutama melalui operasi maritim bersama dengan NATO (Robinson, 2021). Kebijakan Inggris yang menekankan pada kemampuan untuk mendeteksi dan melacak aktivitas kapal selam di perairan Atlantik menunjukkan respons serius terhadap ancaman tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan. Metode ini bertujuan untuk memahami kebijakan yang diambil oleh Boris Johnson terkait keamanan maritim di Atlantik Utara. Penelitian ini akan mengeksplorasi dokumen kebijakan resmi, laporan pemerintah, serta wawancara dengan ahli (jika tersedia). Analisis kebijakan kualitatif melibatkan kajian mendalam terhadap isi kebijakan, konteks implementasi, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut terhadap keamanan maritim.

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua dokumen kebijakan, laporan, artikel, dan publikasi yang berkaitan dengan kebijakan Boris Johnson tentang keamanan maritim di Atlantik Utara, serta kebijakan maritim Inggris secara umum selama masa kepemimpinan Johnson.

Sampel diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih dokumen dan publikasi yang paling relevan, seperti pernyataan resmi pemerintah Inggris, laporan NATO, serta artikel jurnal akademik yang membahas keamanan maritim di Atlantik Utara selama masa jabatan Boris Johnson.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis kebijakan. Analisis isi dilakukan untuk mengevaluasi teks kebijakan dan dokumen resmi yang berisi keputusan serta strategi yang diterapkan Boris Johnson terkait keamanan maritim. Dalam analisis kebijakan, peneliti akan mengevaluasi tujuan kebijakan, proses implementasi, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, terutama dalam konteks stabilitas keamanan di Atlantik Utara. Hasil analisis akan diinterpretasikan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kebijakan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Analisis Kebijakan Modernisasi Angkatan Laut Inggris di Era Boris Johnson

Hasil analisis terhadap dokumen kebijakan resmi dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan Boris Johnson, Inggris fokus pada modernisasi angkatan lautnya. Salah satu pencapaian utama adalah peningkatan armada kapal, termasuk kapal induk HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales, yang diperkenalkan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kekuatan maritim Inggris di perairan internasional, termasuk Atlantik Utara. Modernisasi ini juga mencakup peningkatan teknologi pertahanan seperti sistem sonar dan deteksi kapal selam, yang penting dalam menghadapi ancaman dari Rusia (House of Commons, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Johnson memprioritaskan peningkatan kemampuan maritim untuk menjaga keamanan di Atlantik Utara.

Analisis Kebijakan Kolaborasi Inggris dengan NATO dan Sekutu Transatlantik

Hasil dari analisis kebijakan dan laporan NATO menunjukkan bahwa Inggris di bawah Boris Johnson terus berperan aktif dalam operasi keamanan maritim yang dipimpin oleh NATO di Atlantik Utara. Kolaborasi erat dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya, termasuk latihan militer gabungan dan operasi pengawasan, berfungsi untuk memantau aktivitas kapal selam Rusia di wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa Inggris meningkatkan perannya dalam memimpin misi pengawasan kapal selam di Atlantik Utara, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan melindungi jalur perdagangan internasional (NATO, 2020). Ini menegaskan komitmen Johnson untuk memastikan bahwa Inggris tetap menjadi kekuatan kunci dalam aliansi pertahanan maritim NATO.

Analisis Kebijakan Respon Inggris terhadap Ancaman dari Kapal Selam Rusia

Analisis terhadap sumber-sumber sekunder dan laporan intelijen menunjukkan bahwa salah satu ancaman utama yang dihadapi di Atlantik Utara adalah aktivitas kapal selam Rusia. Aktivitas ini dilaporkan meningkat, dan Boris Johnson merespon dengan memperkuat pertahanan bawah laut Inggris.

Penelitian ini menemukan bahwa di bawah kepemimpinan Johnson, Inggris memperkenalkan langkah-langkah yang lebih ketat dalam hal pengawasan bawah laut, termasuk penggunaan teknologi sonar yang lebih canggih dan peningkatan frekuensi patroli maritim di wilayah Atlantik Utara (Connolly, 2020). Kebijakan ini membantu meningkatkan keamanan di kawasan tersebut dan memastikan kesiapan Inggris menghadapi ancaman dari Rusia.

Analisis Kebijakan Dampak Brexit terhadap Keamanan Maritim Inggris

Penelitian ini juga menemukan bahwa Brexit membawa dampak pada kebijakan keamanan maritim Inggris. Meskipun Inggris tidak lagi menjadi bagian dari kerangka kerja pertahanan Uni Eropa, di bawah Boris Johnson, negara ini berhasil mempertahankan komitmen kuat terhadap NATO dan sekutu-sekutu transatlantik. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Brexit tidak secara signifikan mengurangi peran Inggris dalam keamanan maritim Atlantik Utara. Sebaliknya, Johnson berhasil memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara NATO dan memastikan bahwa Inggris tetap menjadi pemain utama dalam operasi keamanan maritim (Rynning, 2019). Hasil ini menegaskan bahwa Inggris tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas maritim di kawasan Atlantik Utara meskipun keluar dari Uni Eropa.

Analisis Kebijakan Efektivitas Kebijakan Keamanan Maritim Boris Johnson

Hasil evaluasi kebijakan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan keamanan maritim yang diambil oleh Boris Johnson di Atlantik Utara cukup efektif dalam menghadapi tantangan geopolitik yang ada. Modernisasi angkatan laut, kolaborasi dengan NATO, serta fokus pada peningkatan keamanan bawah laut semuanya berkontribusi pada peningkatan stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun tantangan dari Rusia dan dinamika pasca-Brexit masih ada, kebijakan Johnson secara umum berhasil melindungi kepentingan Inggris dan sekutu-sekutunya di Atlantik Utara (Whitman, 2019). Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam hal investasi berkelanjutan pada teknologi militer maritim.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Boris Johnson terhadap Keamanan Maritim di Atlantik Utara, beberapa poin kunci dapat dibahas terkait efektivitas kebijakan yang diambil, tantangan yang dihadapi, serta dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut.

1. Modernisasi Angkatan Laut Inggris: Relevansi dan Dampak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Boris Johnson dalam memodernisasi angkatan laut Inggris sangat relevan dengan kebutuhan keamanan maritim di Atlantik Utara. Penguatan kapal induk dan sistem pertahanan bawah laut menjadi langkah strategis dalam merespons ancaman modern, terutama dari kapal selam Rusia. Modernisasi ini mencerminkan respons Inggris terhadap kebutuhan mempertahankan supremasi maritim di kawasan yang semakin rawan ancaman. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi militer Inggris juga memperkuat daya tawar politiknya di arena

internasional. Namun, pembahasan ini juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan modernisasi ini sangat tergantung pada keberlanjutan investasi dan pelatihan personel dalam menghadapi perkembangan teknologi militer yang terus berubah (House of Commons, 2020).

2. Kolaborasi dengan NATO: Pilar Keamanan Atlantik Utara

Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi Inggris dengan NATO, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di Atlantik Utara. Selama kepemimpinan Boris Johnson, Inggris tetap mempertahankan komitmen kuat terhadap NATO, meskipun terjadi perubahan geopolitik akibat Brexit. Kolaborasi erat dengan sekutu, terutama Amerika Serikat, melalui operasi gabungan dan latihan militer, memperkuat keamanan di wilayah Atlantik Utara. Ini menunjukkan bahwa Inggris, meskipun telah keluar dari Uni Eropa, tetap memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan global melalui kerangka kerja NATO (Rynning, 2019). Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya Inggris mempertahankan kepercayaan sekutu-sekutunya melalui kontribusi yang signifikan dalam operasi keamanan maritim, terutama di perairan yang strategis seperti Atlantik Utara.

3. Ancaman Kapal Selam Rusia dan Respons Inggris

Salah satu hasil penelitian yang menarik adalah peningkatan aktivitas kapal selam Rusia di Atlantik Utara, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara NATO, termasuk Inggris. Boris Johnson merespons ancaman ini dengan meningkatkan pengawasan bawah laut dan memperkuat patroli maritim, terutama di perairan strategis Atlantik Utara. Pembahasan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat serta penggunaan teknologi canggih, seperti sonar dan sistem deteksi bawah laut, menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan maritim Inggris. Namun, pembahasan ini juga mencatat bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan teknologi antara Rusia dan NATO di wilayah ini (Connolly, 2020). Oleh karena itu, kolaborasi multilateral dalam berbagi intelijen dan teknologi harus terus diprioritaskan untuk memastikan respons yang efektif terhadap ancaman ini.

4. Dampak Brexit terhadap Kebijakan Keamanan Maritim

Brexit membawa perubahan signifikan terhadap hubungan Inggris dengan Uni Eropa, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Boris Johnson mampu menjaga komitmen Inggris terhadap NATO dan keamanan Atlantik Utara. Dalam pembahasan ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun Inggris tidak lagi menjadi bagian dari kerangka kerja pertahanan Uni Eropa, hubungan bilateral dengan negara-negara NATO tetap terjaga dengan baik. Johnson memfokuskan kebijakan luar negeri Inggris pada penguatan hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara kunci NATO lainnya (Whitman, 2019). Pembahasan ini menekankan bahwa Inggris harus terus beradaptasi dengan dinamika politik pasca-Brexit, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan luar negeri yang independen dan komitmen keamanan kolektif melalui NATO.

5. Efektivitas Kebijakan dan Tantangan di Masa Depan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan maritim Boris Johnson di Atlantik Utara cukup efektif dalam menangani ancaman yang muncul. Namun, tantangan di masa depan tidak bisa diabaikan. Pembahasan ini menekankan bahwa efektivitas jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan Inggris untuk terus berinvestasi dalam teknologi pertahanan dan menjaga stabilitas hubungan dengan sekutu internasional. Inggris juga harus terus mengantisipasi ancaman baru yang muncul dari perkembangan geopolitik global, termasuk potensi konflik di wilayah Arktik yang semakin relevan dalam konteks keamanan maritim (Till, 2009).

Pembahasan di atas menyoroti pentingnya kebijakan keamanan maritim Boris Johnson dalam menghadapi ancaman di Atlantik Utara, khususnya dalam konteks kolaborasi dengan NATO, modernisasi angkatan laut, dan penanganan ancaman dari Rusia. Meskipun kebijakan-kebijakan ini telah menunjukkan hasil positif, masa depan keamanan maritim Inggris di kawasan ini tetap penuh tantangan, terutama dalam konteks perubahan geopolitik global dan perkembangan teknologi militer yang pesat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan Boris Johnson terhadap keamanan maritim di Atlantik Utara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas maritim di wilayah tersebut. Kebijakan modernisasi angkatan laut Inggris melalui penguatan armada dan peningkatan teknologi pertahanan maritim terbukti efektif dalam menghadapi ancaman keamanan, terutama dari kapal selam Rusia yang aktif di Atlantik Utara. Kolaborasi erat dengan NATO dan sekutu internasional memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan utama dalam keamanan maritim global, meskipun Inggris telah keluar dari Uni Eropa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam hal kesinambungan investasi pertahanan dan adaptasi terhadap dinamika geopolitik pasca-Brexit. Inggris harus terus mempertahankan perannya sebagai aktor utama di NATO dan menjaga stabilitas di Atlantik Utara melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.

2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

a. Peningkatan Investasi dalam Teknologi Maritim

Inggris harus terus berinvestasi dalam teknologi maritim canggih, seperti sistem deteksi kapal selam dan drone bawah laut, untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang, terutama dari Rusia. Modernisasi angkatan laut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa Inggris tetap memiliki kekuatan maritim yang siap menghadapi berbagai skenario ancaman di masa depan.

b. Penguatan Kolaborasi dengan NATO dan Mitra Internasional

Mengingat pentingnya keamanan kolektif di Atlantik Utara, Inggris harus terus memperkuat kerja sama dengan NATO dan mitra-mitra utama seperti Amerika Serikat. Latihan militer gabungan dan operasi patroli bersama harus tetap diprioritaskan untuk meningkatkan kesiapan dan koordinasi dalam menghadapi ancaman di wilayah tersebut.

c. Pengembangan Strategi Keamanan Maritim Pasca-Brexit

Inggris perlu mengembangkan strategi keamanan maritim yang lebih mandiri namun tetap berkoordinasi erat dengan sekutu Eropa dan NATO. Strategi ini harus mencakup peran Inggris dalam keamanan global dan menjawab tantangan baru yang muncul akibat perubahan hubungan geopolitik pasca-Brexit.

d. Peningkatan Kapabilitas Intelijen Maritim

Untuk menghadapi ancaman kapal selam dan aktivitas maritim ilegal, Inggris harus memperkuat kapabilitas intelijen maritimnya. Penggunaan satelit, sistem sonar, dan berbagi data intelijen dengan sekutu dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan di perairan strategis Atlantik Utara.

e. Fokus pada Stabilitas Jangka Panjang di Atlantik Utara dan Arktik

Mengingat meningkatnya minat geopolitik di wilayah Arktik yang berdekatan dengan Atlantik Utara, Inggris harus mulai merumuskan kebijakan yang memperhitungkan stabilitas jangka panjang di kedua kawasan. Perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi maritim di Arktik juga akan berdampak pada keamanan maritim di Atlantik Utara, sehingga kebijakan Inggris harus berorientasi pada pencegahan konflik di masa depan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini terutama bergantung pada sumber-sumber sekunder, seperti dokumen kebijakan dan laporan dari pemerintah serta NATO, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh Boris Johnson. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan Boris Johnson tanpa mengeksplorasi kebijakan sebelumnya secara mendalam atau membandingkannya dengan kebijakan pemerintah yang mengikuti setelahnya. Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan data primer, seperti wawancara dengan para pemangku kebijakan langsung, yang dapat memperkaya analisis.

Saran untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Studi Longitudinal terhadap Kebijakan Maritim Inggris

Penelitian lebih lanjut dapat melakukan studi longitudinal untuk membandingkan kebijakan maritim di bawah Boris Johnson dengan kebijakan di era kepemimpinan lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan maritim Inggris berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana kontinuitas serta perubahan kebijakan memengaruhi keamanan maritim di Atlantik Utara.

2. Penelitian dengan Data Primer

Melakukan penelitian dengan menggunakan data primer, seperti wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, ahli militer, atau anggota NATO, dapat memberikan pandangan yang lebih rinci tentang keputusan-keputusan kebijakan yang diambil. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung mengenai motivasi dan tantangan dalam penerapan kebijakan maritim.

3. Analisis Perbandingan Antarnegara

Penelitian di masa mendatang dapat melakukan studi perbandingan antara kebijakan maritim Inggris dengan kebijakan negara-negara NATO lainnya, seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Prancis. Perbandingan ini akan membantu mengevaluasi apakah Inggris memiliki pendekatan yang unik dalam menjaga keamanan di Atlantik Utara atau apakah kebijakan yang diambil memiliki kemiripan dengan sekutu-sekutunya.

4. Studi Dampak Ekonomi dari Keamanan Maritim

Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji dampak kebijakan keamanan maritim terhadap aspek ekonomi, seperti perdagangan internasional dan aktivitas industri maritim. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan maritim di Atlantik Utara mempengaruhi stabilitas ekonomi dan perdagangan global, terutama di era yang semakin tergantung pada perdagangan maritim.

5. Penelitian tentang Peran Teknologi dalam Keamanan Maritim

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi pertahanan, penelitian lebih lanjut dapat meneliti bagaimana inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan, sistem sonar canggih, dan drone bawah laut, memengaruhi kemampuan Inggris dan NATO dalam menjaga keamanan maritim di Atlantik Utara. Fokus ini akan memberikan pandangan tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat kebijakan keamanan maritim di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang menyediakan informasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Childs, N. (2020). *Modernising the Royal Navy: Facing New Threats in a Changing Global Environment*. Routledge.
- Connolly, R. (2020). *Russian Submarine Operations in the North Atlantic: Implications for Western Security*. *International Affairs Journal*, 96(5), 1121-1145.
- Hitt, M., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2017). *Strategic Management: Competitiveness and Globalization*. Cengage Learning.
- House of Commons. (2020). *The UK's Post-Brexit Defence and Security Policy: House of Commons Defence Committee Report*. UK Parliament.
- International Maritime Organization (IMO). (2020). *International Shipping and Security Report*. IMO Publications.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783*. Little, Brown, and Company.
- NATO. (2020). *NATO's Role in Maritime Security in the North Atlantic*. NATO Publications.
- Robinson, P. (2021). *Strategic Maritime Operations: The Role of the UK in NATO's Atlantic Defence Strategy*. *Naval Review Journal*, 109(3), 45-58.
- Rynning, S. (2019). *NATO's Future: The Atlantic Alliance in an Era of Great Power Competition*. *International Affairs*, 95(2), 351-370.
- Simpson, J. (2017). *Britain's Role in NATO: A Historical Perspective*. *Defence Studies*, 30(4), 211-229.
- Till, G. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge.
- Whitman, R. G. (2019). *Brexit and Britain's Foreign Policy: Security and Defence*. *Journal of European Public Policy*, 26(5), 763-778.